

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Burgelijk Wetboek voor Indonesie / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 251)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31) sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 182)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 185)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20
tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan
Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan
Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang
Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat serta kuasa-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Imam Priandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
 2. Ibu Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum;
 3. Bapak Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji Tesis dan Ibu Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M. selaku dosen anggota penguji tesis;
 4. Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H. selaku Pembimbing Tesis;
 5. Para Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, yang memberikan kepada saya kesempatan kuliah, belajar dan menyelesaikan tesis serta menyelesaikan masa studi;
 6. Papa, Mama, serta segenap keluarga yang ikut memberikan doa dan restunya serta memberikan dukungan materiil dan moral;
 7. Juan, Natalia, dan anggota CGC220, yang telah mendoakan penyertaan Tuhan dalam kesuksesan penyelesaian tesis ini;
 8. Teman-teman seperjuangan yaitu Cindy, Hansen, Alfredo, Salvian, Jeremia Junior, Tamara Teguh, Shannon yang telah memberi semangat dan menemani hari-hari sampai selesainya penulisan tesis ini;
 9. Rekan-rekan satu angkatan tahun 2019 yang kompak sehingga membuat suasana kuliah bagai dalam lingkungan keluarga;
 10. Rekan-rekan, kolega, staf, keluarga dan siapa saja baik yang secara langsung maupun tidak langsung ikut mendukung dan memberikan doa restunya selama kuliah sampai selesainya tesis ini;
- Semoga amal budi baiknya mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Semoga pula penulisan tesis ini berguna bagi siapa saja yang membacanya

Surabaya, 29 Januari 2021

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Permasalahan	1
2. Rumusan Masalah	5
3. Tujuan Penulisan.....	6
4. Manfaat Penelitian	6
5. Tinjauan Pustaka	7
6. Metode Penelitian.....	20
7. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II RATIO LEGIS PENGATURAN PENGELOLAAN DATA OLEH PENYELENGGARA JASA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.....	25
1. Sifat Hubungan Hukum antara Para Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	25

2. Pengumpulan dan Pengelolaan Data Pengguna Jasa <i>Peer to Peer Lending</i> oleh Penyelenggara Jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	36
BAB III UPAYA HUKUM PENGGUNA JASA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI ATAS TINDAKAN PENYELENGGARA TERKAIT KERAHASIAAN DATA.....	55
1. Kedudukan Penyelenggara dan Pengguna Berdasarkan Hukum perlindungan Konsumen	55
2. Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk Menangani Sengketa Konsumen di Sektor Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	62
3. Kewenangan Pengadilan untuk Menangani Sengketa Konsumen di Sektor Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	67
BAB IV PENUTUP	70
DAFTAR BACAAN	